

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kaum perempuan dan kaum laki-laki, mereka bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa Indonesia menuju titik kemajuan dan kemerdekaan. Salah satu peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Poesponegoro dan Notosusanto dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia V, mengatakan bahwa semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang banyak membawa pengaruh yang besar pada kaum wanita pribumi. Sama halnya seperti kaum laki-laki mereka tumbuh kesadarannya akan situasi dan kondisi hidup dalam masyarakat yang terjajah (2009, hlm.411). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa semangat kebangsaan bukan hanya milik kaum laki-laki saja, tetapi perempuan juga ikut andil. Semangat kebangsaan tersebut merupakan langkah awal menuju kesadaran nasional dan rasa persatuan serta kesatuan. Selain itu peranan kaum perempuan dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam panggung sejarah Indonesia yang banyak menunjukkan pergerakan, perjuangan, serta pengorbanannya untuk menyebarkan benih-benih kemerdekaan.

Awal abad ke-20 merupakan awal semangat kaum perempuan dalam melakukan pergerakan untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan adanya kebijakan politik etis yang diberlakukan di Hindia-Belanda sejak tahun 1901 yang telah membawa perubahan besar serta berdampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Politik etis merupakan arah baru dari politik kolonial Belanda yang menganggap bahwa Hindia-Belanda tidak lagi sebagai “*Wingewest*” (daerah yang menguntungkan), tetapi harus menjadi daerah yang perlu dikembangkan agar dapat memenuhi keperluannya, dan budaya rakyatnya perlu ditingkatkan (Ekadjati, 1986, hlm.55). Selain itu Ricklefs (2012, hlm. 228) mengatakan bahwa kebijakan politik etis (*etische politiek*) atau lebih dikenal dengan sebutan *trilogi van Deventer*, menciptakan perubahan yang sangat

besar bagi Hindia-Belanda, karena politik etis memberikan peluang kepada masyarakat Hindia-Belanda untuk mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan, kebijakan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan pada masyarakat Hindia-Belanda yaitu kebijakan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran. Menurut Wahyu (2014, hlm.1) pendidikan dinilai sebagai jalan untuk memperbaiki nasib rakyat, karena melalui pendidikan nasib rakyat akan menjadi lebih baik. Selain itu Poesponegoro dan Notosusanto (2009, hlm. 411) mengemukakan bahwa salah satu faktor pendorong perubahan itu adalah pendidikan Barat, yang menghasilkan elite baru dalam masyarakat kolonial yang disebut dengan elite modern. Sehingga pendidikan merupakan faktor penting dalam memperbaiki keadaan masyarakat Hindia-Belanda.

Kartodirjo (1992, hlm. 60) mengemukakan bahwa pada masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia, pendidikan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk melawan kolonial, pendidikan merupakan dinamit bagi sistem kolonial itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapatnya Colijn (dalam Brouwer, 1958, hlm. 146) yang mengemukakan bahwa sebuah tragedi politik kolonial karena telah membangun dan membentuk kekuatan-kekuatan yang dikemudian hari akan melawan pemerintahan kolonial, kekuatan yang sangat besar diantaranya bidang pendidikan, bidang ini dikatakan sebagai alat penting yang memiliki kekuatan dan pengaruh cukup besar karena pendidikan melahirkan kaum terpelajar. Kaum terpelajar inilah yang merupakan pendorong lahirnya berbagai macam pergerakan di Hindia-Belanda dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan (Pringgodigdo, 1986, xi). Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang dikemukakan tersebut, dapat terlihat bahwa kebijakan politik etis terutama dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan Bangsa Indonesia serta menjadi pondasi awal munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang akan berdampak terhadap keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa Belanda itu sendiri.

Politik etis telah memberikan peranan yang baik dalam meningkatkan pendidikan, sesuai dengan pernyataan Ekadjati (1986) dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan Jawa Barat mengatakan, bahwa dalam bidang pendidikan Pemerintah memberikan kebijaksanaan sebagai berikut:

(1) Pemberian pendidikan untuk lapisan atas, agar mereka dapat menduduki tempat-tempat yang diduduki oleh orang-orang Belanda; (2) Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka; (3) Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan kepada golongan Bumiputera, untuk itu bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah ; (4) Jumlah sekolah diperbanyak dan diperbaiki (hlm. 55-56).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Belanda memperbanyak pendirian sekolah-sekolah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Pribumi dari kalangan bangsawan maupun kalangan rakyat agar memperoleh pendidikan, meskipun dalam prakteknya terdapat perlakuan yang berbeda antara kalangan atas dengan kalangan bawah, hal itu dapat terlihat dari pemisahan pendidikan antara dua golongan tersebut, dimana terdapat sekolah yang diperuntukan bagi kalangan atas dan sekolah yang diperuntukan bagi kalangan rendah. Selain itu tidak semua rakyat Bumiputera mengenyam pendidikan di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda, dikarenakan masyarakat Pribumi tidak sanggup membayar biaya sekolah yang mahal. Hal ini menyebabkan peserta didik yang memasuki sekolah lebih banyak berasal dari Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing, sedangkan Golongan Bumiputera hanya sebagai minoritas.

Kesempatan untuk bersekolah biasanya hanya didapat oleh golongan bangsawan (priyayi), sedangkan dari golongan rakyat biasa berpeluang kecil untuk mendapatkan pendidikan dibangku sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Djumhur dan Danasaputra (1959, hlm.122-123) bahwa kalangan rakyat biasa tidak bisa merasakan proses pendidikan sebagaimana anak-anak dari kalangan bangsawan. Namun pada tahap selanjutnya sekolah-sekolah untuk rakyat biasa didirikan, sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, artinya pengajaran di sekolah tersebut hanya semata-mata untuk menjadi pekerja pada pemerintah Belanda. Sesuai dengan pendapatnya Poesponegoro dan Notosusanto (2009, hlm.37) yang mengatakan bahwa kebijakan pendidikan semata-mata hanya untuk keuntungan pemerintah Belanda, pemerintah Belanda berkeinginan untuk mendapatkan pekerja yang terampil dengan pembayaran upah yang sedikit, terutama dalam bidang administrasi. Hal tersebut didukung oleh pendapatnya Anrooij (2009, hlm. 107) yang mengatakan bahwa jika tenaga pekerja yang

terampil diambil dari Belanda secara langsung, maka pemerintah akan mengeluarkan anggaran besar, karena biayanya mahal. Oleh sebab itu pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik calon pekerja dari Pribumi yang bisa dibayar dengan murah, sehingga akan memperkecil anggaran pemerintah.

Pendidikan di sekolah rata-rata hanya dapat dinikmati oleh kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan berpeluang kecil untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, dikarenakan tujuan utama pendidikan dengan didirikannya sekolah-sekolah tersebut yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja. Oleh sebab itu tidak selayaknya perempuan mendapatkan pendidikan karena tidak akan berguna banyak bagi pemerintah Belanda, karena yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda adalah laki-laki yang memiliki tenaga yang besar untuk bekerja di perusahaan milik pemerintah. Selain itu dalam kehidupan sosial, perempuan dibatasi dan diatur oleh tradisi dan juga budaya, begitupun dengan stratifikasi kaum perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki, budaya tersebut lebih dikenal dengan sebutan budaya patriarki (Vreede & Stuers, 2008, hlm.45). Budaya patriarki inilah menyebabkan kaum perempuan dipandang tidak mempunyai kekuatan dalam menentukan sikap dan perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, artinya kedudukan kaum perempuan berada dibawah kaum laki-laki. Hal tersebut digambarkan dalam surat-surat Kartini yang dikutip oleh Poesponegoro dan Notosusanto (2009), sebagai berikut :

“Kami, gadis-gadis masih terikat oleh adat lama dan sedikit sekali memperoleh kebahagiaan dari kemajuan pengajaran. Untuk keluar rumah sehari-hari dan mendapat pelajaran di sekolah saja sudah dianggap melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berusia dua belas tahun, saya dikurung di dalam rumah, saya mesti masuk “kurungan”. Saya dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar dunia itu lagi bila tidak disertai oleh seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi saya, dipilih oleh orang tua saya untuk saya, dikawinkan dengan saya tanpa sepengetahuan saya sendiri (hlm. 264).

Keadaan tersebut menggambarkan kekangan yang dialami perempuan sebelum abad 20 yang terjadi di wilayah Priangan, terutama di Cianjur. Kaum perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan kehidupannya, yang disebabkan karena adat istiadat membatasi ruang gerak perempuan, terutama

dalam hal perkawinan dan pendidikan. Dalam memperoleh pendidikan laki-laki lebih di dahulukan dibandingkan dengan perempuan. Ada beberapa alasan yang menjadikan anak-anak perempuan kurang diperhatikan dalam memperoleh pendidikan di sekolah, Wiriaatmadja (1981) sebagai berikut:

(1) Pendidikan bagi anak perempuan tidak perlu, atau belum dapat melihat kegunaannya; (2) bersama-sama dengan anak laki-laki dalam satu sekolah tidak baik, jadi orang berkeberatan terhadap ko-edukasi; (3) anak-anak perempuan pada usia muda pun sudah banyak membantu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga; (4) bertentangan dengan adat; (5) anak perempuan cepat menikah; (6) anak perempuan yang sekolah sulit dalam memilih jodoh dan kemudian tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan di dapur; (7) meskipun sekolah anak perempuan toh tidak akan bekerja ; (8) anak perempuan yang sekolah kelak akan bersikap sombong terhadap suami yang tidak sekolah, dan lain-lain alasannya lagi (hlm. 43).

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa paradigma masyarakat sangat membatasi kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, padahal pendidikan merupakan aspek yang penting bagi kemajuan perempuan. Akibat pengekan dalam memperoleh pendidikan menyebabkan kaum perempuan banyak yang tidak dapat membaca atau buta huruf. Selain itu akibat dari rendahnya pendidikan menyebabkan kehidupan mereka sangat terbatas, mereka tidak bisa mencari nafkah sendiri sehingga hidupnya bergantung kepada suami. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan, masalah-masalah penceraian dan poligami merupakan hal yang biasa karena lemahnya kedudukan kaum perempuan yang tidak bisa menentang kehendak kaum laki-laki. Selain itu akibat rendahnya pendidikan menyebabkan maraknya kasus pergundikan, pelacuran, bahkan perdagangan perempuan (Wiriaatmadja, 1981, hlm. 36-38).

Keadaan inilah yang menimbulkan semangat dan usaha kaum perempuan untuk memperbaiki nasib kaumnya, usaha-usaha itu berkembang pesat pada awal abad 20 yang beriringan dengan semangat pergerakan nasional. Perbaikan nasib tersebut dilatarbelakangi karena adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang diakibatkan karena kolonisasi dan adat istiadat yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial. Pada masa itu banyak tokoh-tokoh perempuan yang berani menentang adat istiadat dan ingin merubah pola pikir masyarakat yang mengekang kaum perempuan, mereka

beranggapan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki, terutama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, hal tersebut semata-mata demi kemajuan kaum perempuan (Ekadjati, 2010, hlm.72-73). Usaha perbaikan atas kondisi ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan, sejatinya harus diperjuangkan oleh kaum perempuan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suryochondro (1984), yang mengemukakan bahwa :

Sudah selayaknya bahwa keinginan dan dorongan untuk memajukan wanita berasal dari kaum wanita sendiri. Mereka tidak lagi merasa puas dengan cara hidup yang terbatas yang diisi dengan kewajiban-kewajiban untuk keluarga dan rumah tangga saja, mereka ingin memperoleh kebebasan dan bekerja di lingkungan yang lebih luas. Juga dialami ketidakadilan dalam adat istiadat yang berlaku dalam perkawinan seperti kawin paksa, sistem poligami, sistem *selir*, ditambah dengan adanya sistem *nyai* dalam masyarakat kolonial. Di lapangan pekerjaan pun dirasakan ketidakadilan dengan adanya berbagai diskriminasi, misalnya mengenai upah buruh wanita yang bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik (hlm.79).

Hal ini menjadi dorongan untuk memajukan kaum perempuan untuk mendobrak ketidakadilan yang berlaku di masyarakat. Mereka ingin mendapat perlakuan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan tanpa ada diskriminasi. Sehingga pada awal abad 20 munculah tokoh-tokoh yang peduli terhadap perempuan, salah satu diantaranya yaitu Nyi Raden Siti Jenab (Dirapradja, 2007, hlm.20-21).

Pemikiran Siti Jenab tidak jauh berbeda dengan tokoh pendidikan perempuan di Jawa Barat lainnya, seperti Lasminingrat dan Dewi Sartika. Mereka sama-sama ingin mendobrak ketidakadilan akibat adat lama, dan juga ingin mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Siti Jenab beranggapan dengan pendidikan perempuan akan maju dan bisa merubah nasibnya, karena pendidikan dapat memberikan kecakapan tertentu kepada perempuan sehingga ia mampu berdiri sendiri dan tidak menggantungkan hidup pada ayah atau suaminya. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut maka didirikanlah sekolah khusus perempuan yang bernama *Sakola Istri*.

Perjuangan Siti Jenab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dilakukan dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dan dari desa ke desa (Mubarak, 2018, hlm 2). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepeduliannya terhadap pendidikan

sangat besar selain itu pendidikan yang diberikan tidak hanya diperuntukan bagi anak-anak kaum bangsawan saja, melainkan kepada seluruh anak-anak kaum perempuan yang mempunyai keinginan untuk belajar, tanpa mengenal status sosial si anak. Oleh sebab itu menjadi keunikan tersendiri untuk diteliti lebih dalam bagaimana Siti Jenab mempunyai pola pikir untuk memajukan pendidikan kaum perempuan tanpa memandang status anak perempuan tersebut, karena pendidikan tersebut bukan hanya diperuntukan bagi keturunan kaum ningrat, kaum bangsawan ataupun kaum priyayi saja, tetapi pendidikan tersebut diperuntukan untuk semua kalangan kaum perempuan di Cianjur, baik yang statusnya bangsawan ataupun masyarakat biasa.

Perjuangan Siti Jenab dalam mendirikan sekolah untuk kaum perempuan tentunya tidak sendirian, ia didukung oleh kerabat, Bupati Cianjur dan juga tokoh ulama setempat. Sehingga atas dukungan mereka, tahun 1906 dibuka sekolah perempuan pertama di Cianjur yang bernama *Sakola Istri Tjiandjoer*. Banyak terjadi penolakan dari masyarakat Cianjur terhadap pendirian sekolah perempuan tersebut, terutama masyarakat islam ortodoks yang fanatis, mereka beranggapan jika menyekolahkan anak perempuan termasuk kedalam kategori “haram” dan lain sebagainya (YPI Riyadhul-Muttaqien, 1993, hlm.7). Keadaan itulah yang menjadi tantangan bagi Siti Jenab untuk menghadapi dan juga menyadarkan pandangan masyarakat yang masih kental dengan budaya dan juga adat istiadat tentang pentingnya persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu perempuan merupakan calon seorang ibu, sudah selayaknya mendapatkan pendidikan, karena dengan pendidikan yang baik maka dia akan menjadi menjadi seorang istri dan ibu yang baik dalam keluarga.

Pendidikan yang diterapkan di *Sakola Istri Siti Jenab* yaitu tentang bagaimana menjadi seorang istri yang bisa mengelola rumah tangga dengan baik. Adapun materi-materi yang diajarkan diantaranya mengenai keterampilan seorang wanita, membaca, menulis, berhitung, bahasa Sunda, bahasa Belanda, bahasa melayu, budi pekerti, agama, pengetahuan keterampilan seperti membuat, merenda, dan menjahit (Dirapradja, 2007, hlm.21). Sehingga jika dilihat dari

materi pengajarannya ada kesamaan dengan yang konsep pengajaran di sekolah Dewi Sartika dan juga Lasminingrat. Oleh sebab itu menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengapa konsep pengajaran Kautamaan Istri Siti Jenab memiliki kesamaan dengan konsep pengajaran di sekolah Kautamaan Istri Dewi Sartika dan Lasminingrat.

Semangat Siti Jenab dalam memberikan pengajaran bagi kaum perempuan sangat tinggi, meskipun telah berkeluarga dan banyak rintangan tetapi beliau tetap gigih dan terus berusaha memajukan kaumnya sampai beliau pensiun di tahun 1950. Hal tersebut sangat berdampak kepada pendidikan di Cianjur, terutama munculnya golongan terdidik dari kaum perempuan di Cianjur. Atas jasa-jasanya di Cianjur, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial juga dari masyarakat saat itu.

Alasan peneliti ingin mengkaji mengenai peranan Siti Jenab dalam mengembangkan pendidikan kaum perempuan di Cianjur, dikarenakan peneliti memiliki ketertarikan terhadap pergerakan perempuan khususnya tokoh perempuan Siti Jenab yang memiliki kontribusi dan peran dalam membangun kemajuan bagi kaum di Cianjur melalui pendidikan. Selain dari itu kebanyakan orang banyak yang sudah mengenal tokoh-tokoh seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Lasminingrat dan yang lainnya. Mereka merupakan tokoh-tokoh perempuan yang peduli terhadap kaumnya, namun sosok Raden Siti Jenab kurang dikenal oleh khalayak umum bahkan masyarakat Cianjur sendiri kurang mengetahui sosok Raden Siti Jenab, padahal Siti Jenab memiliki kontribusi yang besar bagi kaum perempuan terutama di Cianjur. Hal lain yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian tentang peranan Siti Jenab dikarenakan sejauh yang peneliti telaah, kajian tentang perempuan sangat minim ditulis oleh para peneliti, terutama peranan perempuan pada masa pergerakan maupun pada masa kemerdekaan.

Peranan tokoh perempuan dalam historiografi Indonesia kurang terekspos, dapat dikatakan bahwa hegemoni laki-laki dalam tulisan sejarah sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 1959 sampai tahun 2014 tercatat 159 orang pahlawan, dengan jumlah laki-laki yang mendominasi yaitu 147 orang, sedangkan jumlah pahlawan perempuan hanya 12 orang (Karseno, 2014, hlm.13),

pada tahun 2018 bertambah menjadi 179 pahlawan, dengan bertambah 2 orang sehingga total 14 orang. Sehingga perbandingannya perempuan hanya mendapat porsi 7% (Abdulsalam, 2017). Padahal tokoh perempuan tentunya memiliki andil dalam memajukan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitupun dengan historiografi maupun riset yang meneliti dan membahas tokoh Siti Jenab sejauh ini sangat sedikit sekali, hal tersebut disebabkan karena sulitnya sumber-sumber mengenai Siti Jenab, berbeda dengan Lasminingrat, Kartini, dan Dewi Sartika yang memiliki karya-karya yang ditinggalkan, contohnya surat-surat ataupun karangan-karangannya, sedangkan Siti Jenab tidak meninggalkan berupa catatan. Hal tersebut berdampak kepada masyarakat Cianjur yang kurang mengetahui tentang sosok dan peranan Siti Jenab, padahal Siti Jenab merupakan tokoh yang sangat berjasa bagi masyarakat Cianjur, khususnya bagi kaum perempuan. Sehingga Siti Jenab pada tahun 2018 pernah diajukan untuk menjadi pahlawan Nasional oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Melihat kondisi tersebut peneliti selaku generasi muda yang merupakan putra daerah dan juga seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan pendidikan sejarah sangat termotivasi untuk meneliti lebih jauh mengenai Siti Jenab. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menambah tulisan mengenai Siti Jenab, dikarenakan minimnya referensi mengenai sejarah tokoh Siti Jenab khususnya di departemen pendidikan sejarah. Motif kultural yang muncul dalam penelitian ini adalah dalam rangka menyadarkan kepada masyarakat bahwa selain tokoh-tokoh pendidikan perempuan yang populer secara nasional, ternyata masih terdapat tokoh-tokoh daerah yang berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa, oleh sebab itu perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian permasalahan dan alasan yang dikemukakan diatas, maka penelitian mengenai peranan tokoh Siti Jenab yang telah berjuang demi kemajuan kaum perempuan di Cianjur sangat penting. Adapun redaksi judul penelitian yang dikaji adalah peranan Siti Jenab dalam mengembangkan pendidikan kaum perempuan di Cianjur tahun 1906-1950. Untuk membatasi kajian penelitian, peneliti menggunakan tahun 1906 sampai dengan tahun 1950. Alasan peneliti mengkaji sejak tahun 1906 sampai tahun 1950, karena pada tahun

1906 merupakan awal dari peranan Siti Jenab terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan sekolah yang bernama Sakola Istri di Cianjur, sebagai wahana tempat mengajar anak-anak perempuan di Cianjur. Sedangkan pada tahun 1950 merupakan akhir Siti Jenab mendidik, tahun 1950 Siti Jenab harus pensiun dari dunia pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan utama yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peranan Raden Siti Jenab Dalam Mengembangkan Pendidikan Perempuan Di Cianjur 1906-1950”. Adapun dari rumusan permasalahan tersebut dapat diuraikan kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pendidikan pada awal abad ke-20 di Cianjur ?
2. Bagaimana pemikiran Siti Jenab tentang pendidikan kaum perempuan di Cianjur?
3. Bagaimana upaya Siti Jenab dalam mengembangkan pendidikan perempuan di Cianjur tahun 1906-1950?
4. Bagaimana pengaruh peranan Siti Jenab terhadap pendidikan perempuan di Cianjur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti, diantaranya:

1. Mendeskripsikan keadaan pendidikan awal abad ke-20 di Cianjur.
2. Menjelaskan latar belakang pemikiran Siti Jenab tentang pendidikan kaum perempuan.
3. Menguraikan upaya perkembangan pendidikan perempuan di Cianjur yang digagas oleh Siti Jenab sejak tahun 1906-1950.
4. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dengan adanya sekolah perempuan yang didirikan Siti Jenab.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Memperkaya wawasan peneliti mengenai peranan Siti Jenab yang berjuang dalam bidang pendidikan dan menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai bentuk aplikasi atas semua yang didapat selama perkuliahan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Cianjur mengenai peranan Siti Jenab yang berjuang mengangkat harkat martabat perempuan di Cianjur.
3. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan khususnya SMA/SMK/MA, yang dapat dijadikan bahan materi ajar sejarah kelas XI wajib sejarah Indonesia kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan menegakan negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah yang didalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti itu muncul dan penting, serta memuat alasan mengapa memilih masalah tersebut sebagai judul penelitian. Selain itu pada bab ini berisi rumusan masalah yang diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, selain itu pada bab satu memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II kajian pustaka, berisi analisis berbagai sumber ilmiah yang berhubungan dengan dengan tema penulisan skripsi seperti konsep dan landasan teori, dan juga kajian terdahulu yang bertujuan sebagai acuan kerangka berpikir berpikir peneliti dalam penulisan skripsi yang akan mempermudah kajian peneliti dalam meneliti.

Bab III metode penelitian, berisi tahapan-tahapan secara rinci dalam penyusunan skripsi, diantaranya heuristik atau pengumpulan data, kritik atau

verifikasi data, interpretasi atau tafsiran berbagai data yang ditemukan dan historografi atau tahapan penulisan.

Bab IV pembahasan, yang berisi penjelasan dan pemaparan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Yang merupakan inti dari penelitian peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi jawaban yang telah diajukan dan dikemukakan dalam rumusan masalah dan menjadi suatu kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam proses penyusunan skripsi ini.